



KONI Minta Perhatikan Nasib Atlet

KONI Minta Perhatikan Nasib Atlet

MAKASSAR, FAJAR — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar angkat bicara, setelah mereka dipastikan tidak mendapatkan alokasi dana hibah pada APBD 2025.

Ini juga berkaitan dengan sisa dana hibah 2024 yang tidak kunjung dicairkan Pemkot

Makassar, senilai Rp5 miliar. Sebab dianggap mengganggu proses pembinaan para atlet dan cabor.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomantot telah memastikan KONI Makassar tidak akan mendapatkan alokasi dana hibah. Sampai

masalah hukum yang dihadapi Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, bisa selesai.

"Tidak akan dikasih. Jelas itu. Kasih clear dahulu barang-barang (masalah hukum yang berproses). Apa boleh buat, dari pada celaka," tegas Danny, sapaannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, mengatakan, dalam kondisi seperti ini semua pihak harus berpikir besar demi kepentingan atlet, cabor, dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya.

:: Baca KONI... Hlm 11

KONI Minta Perhatikan Nasib Atlet

:: Lanjutan Halaman... 9

"Jangan dihubungkan ini dengan persoalan lain, politik atau apa pun itu. Tidak pas kalau ada upaya menahan pencairan dana hibah itu. Mari kita dewasa menyikapi ini. Apalagi Pak Danny ingin mantan atlet, seharusnya dia tahu kondisi atlet. Bagaimana caranya atlet kita, melalui KONI, prestasinya meningkat," ucap Ahmad.

"Tunjukkan kepada saya, di sisi mana pengelolaan yang dilakukan KONI Makassar ini yang tidak berprestasi dan ukurannya apa saja," sambungnya.

Ahmad membeberkan pada Porprov lalu, Makassar mencetak sejarah. Cabor yang dahulu tidak pernah berprestasi menjadi berprestasi. Pengelolaan organisasi, kerja sama dengan pihak lain baik nasional maupun internasional, satu-satunya KONI yang dapat beasiswa dari

Kementerian Pendidikan, itu dianggap prestasi.

"Hanya KONI Makassar yang dapat bantuan luar negeri, termasuk pembangunan sport center yang kita rencanakan. Juga inovasi, digitalisasi, pengelolaan keuangan, kita lakukan dengan baik. Bahkan cuma KONI penerima hibah yang diaudit, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan kami," terang Ahmad.

Jika alasannya adalah masalah hukum, dia meminta kejelasan apakah kejaksaan melarang hal itu atau tidak. Sebab menurutnya, hal ini tidak berhubungan karena tahun anggarannya berbeda.

"KONI ini kan lembaga, bukan hanya Ahmad Susanto sendiri di sana. Sehingga kalau ada turbulensi, kan ada struktur. Jadi tidak boleh ada alasan untuk menahan hibah itu karena ada proses hukum," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, semua SKPD yang ada di Makassar pernah diperiksa, baik sidik maupun lidik, dimintai konfirmasi, atau hal-hal yang lain. Akan tetapi, anggaran mereka juga tetap berjalan tanpa ada penahanan.

"Kami sudah RDP. Ada Dispora, Inspektorat, KONI, dan cabor. Rekomendasi DPRD itu meminta kepada wali kota, harus memberikan anggaran ke KONI. Inspektorat dan Dispora bicara, mereka mewakili wali kota. Kalau wali kota tidak mengindahkan, berarti dia tidak percaya dengan Inspektorat dan Disporanya," urai dia.

"Kita ini harus berpikir dewasa, saya ini bukan mantan atlet tetapi tahu mengelola atlet. Itu ada yang mantan atlet, masa tidak tahu perasaan atlet? Apakah kita akan mundur lagi? Intinya kami mau wali kota yang peduli olahraga, jangan seperti inilah.

Kita berharap di tangan wali kota baru yang akan datang, saya percaya olahraga akan baik. Beliau (Munafri) betul-betul telah menunjukkan kecintaannya di bidang olahraga, saya rasa ini akan beliau perhatikan," jelasnya.

Koordinator Banggar DPRD Makassar, Andi Suharmika, sebelumnya juga telah membenarkan tidak adanya dana hibah untuk KONI pada APBD 2025. Alasannya, karena surat permohonan KONI terlambat masuk ke Pemkot. "Jadi memang tidak ada. Apalagi sekarang memang ada proses hukum yang jalan, sehingga jadi pertimbangan pemerintah," katanya.

"Yang tahu itu pemerintah. Yang jelas kami meminta agar ada solusi-solusi kepada para cabor yang akan ambil bagian di pra Porda tahun depan," tandasnya. **(wid-mum/yuk)**